



Vol.1 No. 1 Juni 2020



Bani Ma'shum: Identitas Keluarga Besar dan Kontestasi Kapital

1-18 | Hanifa Maulidia

Rihlah Ilmiah dan Kitabah dalam Tradisi Intelektualisme Islam Nusantara YANA PRIYATNA | 19-30

Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka 31-42 | Amsar A. Dulmanan Filsafat Kritis Roy Bhaskar: 'Pelayan' Filosofis untuk Ilmu-Ilmu Sosial Emansipatoris Muhammad Nurul Huda | 43-76

Perang, Repetisi, dan Kosmos: Sebuah Etnografi tentang Perang pada Masyarakat Lembah Agung Baliem 77-98 | Aji Dwi Prasetyo

Birokrasi, Akses Informasi, dan Siasat Warga Prekariat di Negara Pascakolonial MUJTABA HAMDI | 99-112







Editor in Chief

Eneng Darol Afiah, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

Managing Editor

Naeni Amanulloh, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

Editor

Amsar A. Dulmanan, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
Pangeran P.P.A. Nasution, Universitas Malikussaleh
Muhammad Nurul Huda, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
Muhammad Mustafid, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Mujtaba Hamdi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
Fikri Tamau, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Hanifa Maulidia, Sekolah Tinggi Imigrasi
Dewi Anggraeni, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
Muhammad Nurun Najib, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
R.M. Joko P. Mulyadi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
Moh. Faiz Maulana, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

Reviewer

Achmad Munjid, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Ahmad Suaedy, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia
Syamsul Hadi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia
Moh. Yasir Alimi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
Nadiatus Salama, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia
Anton Novenanto, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Akhmad Ramdhon, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Imam Ardhianto, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Achmad Fawaid, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Fariz Alnizar, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia
Pajar Hatma Indra Jaya, Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Ilustrasi Cover

'Menara Petunjuk', Shilfina Putri Widatama

MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi diterbitkan oleh Laboratorium Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. Jurnal ini terbit dua kali setahun, yaitu pada Juni dan Desember.

MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi menyajikan karya-karya ilmiah di bidang sosiologi dan sosial humaniora. MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi mengarahkan diri pada kajian sosial-keagamaan, budaya, politik-ekonomi, serta isu-isu kemanusiaan dan lingkungan hidup baik yang dihasilkan dari penelitian lapangan maupun tinjauan kritis atas teori sosial. MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi mengundang para akademisi dan peneliti di bidang sosial humaniora, khususnya sosiologi, serta para praktisi/aktivis sosial untuk mengirimkan karyanya.



Alamat Editorial:

Kampus UNUSIA Jakarta Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Jakarta Pusat 10430

Telp/Fax: (021) 315 6864 / 390 6501 E-mail: muqaddima.jms@unusia.ac.id

Website: http://journal.unusia.ac.id/index.php/Muqoddima

DAFTAR ISI

1-18	HANIFA MAULIDIA Bani Ma'shum: Identitas Keluarga Besar dan Kontestasi Kapital
19-30	YANA PRIYATNA Rihlah Ilmiah dan Kitabah dalam Tradisi Intelektualisme Islam Nusantara
31-42	AMSAR A. DULMANAN Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka
43-76	MUHAMMAD NURUL HUDA Filsafat Kritis Roy Bhaskar: 'Pelayan' Filosofis untuk Ilmu-Ilmu Sosial Emansipatoris
77-98	AJI DWI PRASETYO Perang, Repetisi, dan Kosmos: Sebuah Etnografi tentang Perang pada Masyarakat Lembah Agung Baliem
99-112	MUJTABA HAMDI Birokrasi, Akses Informasi, dan Siasat Warga Prekariat di Negara Pascakolonial

Birokrasi, Akses Informasi, dan Siasat Warga Prekariat di Negara Pascakolonial

Mujtaba Hamdi

Program Studi Sosiologi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta E-mail: taba@unusia.ac.id

Abstract

Asumsi yang mengatakan negara beroperasi sepenuhnya rasional-formal makin sulit dipertahankan. Negara jauh lebih baik jika dilihat bukan sebagai satu entitas yang solid dan monolitik, melainkan sebagai formasi yang terus membentuk diri melalui berbagai proses persaingan kekuasaan internal dan eksternal, yang tidak lepas dari faktor kekerabatan, pola organisasi sosial, dan, dalam konteks tertentu, sejarah kolonialisme. Penetrasi pasar yang belakangan makin dominan terhadap berbagai sisi negara dan birokrasi menambah dimensi baru dan kompleksitas relasi warga dan negara. Tulisan ini hendak memperlihatkan dinamika formalitas-informalitas itu melalui pegungkapan watak kekuasaan yang mendasari formasi negara. Di sisi lain, tulisan ini akan memperlihatkan bagaimana warga prekariat (precarious citizen) bergerak di antara rasionalitas sekaligus irasionalitas, formalitas sekaligus informalitas, itu untuk mengakses ruang negara yang dianggap serba rasional dan semakin berwatak pasar itu.

Keyword: hubungan negara-masyarakat, prekariat, kewarganegaraan

Abstract

The assumption that the state operates wholly rational-formal is increasingly difficult to maintain. The state would be much better seen not as a solid, monolithic entity, but as a formation that continues to shape itself through various processes of internal and external competing powers, which cannot be separated from kinship relations, social organization, and, in certain contexts, the history of colonialism. Market penetration which has recently become increasingly dominating of the state and the bureaucracy in many ways has added a new dimension and complexity to the relationship between citizens and the state. This paper intends to show the dynamics of these formalities by revealing the nature of power that underlies state formation. On the other hand, this paper will also show how precarious citizens move between rationality and irrationality, formality and informality, to get access to the assumed rational state space which is increasingly has a market character.

Keyword: *state-society relation, precarity, citizenship*

Negara dan Birokrasi: Sangkar Besi Rasionalitas?

Gelombang demokratisasi yang diiringi dengan terbukanya pasar global membuat negara-negara pascakolonial menghadapi perubahan cara dan bentuk dalam mewujudkan kekuasaannya. Mereka mengubah struktur politik, merevisi regulasi, membuka ruang kebebasan media, memperluas akses hak bersuara warga, dan tentu saja juga memperbesar kesempatan investasi luar negeri. Pada situasi ini, negara, pasar dan warga memiliki kapasitas agensi yang relatif otonom—setidaknya secara normatif. Akibatnya, hubungan kekuasaan yang melibatkan negara, warga dan pasar (global) berjalinan makin kompleks sehingga karakter dan arah perjalanan negara tersebut makin tidak mudah dipastikan.

Dalam konteks ini, berbagai pemikiran dan asumsi awal mengenai kepastian cara kerja kekuasaan politik menjadi layak diperiksa kembali. Tumbangnya otoritarianisme dan menguatnya proses demokratisasi kerap dipercaya akan membuat logika kekuasaan negara bergerak secara rasional—rasional dalam pengertian bekerja sesuai tujuan, fungsi dan posisi dalam sistemnya. Asumsi tersebut berangkat dari pikiran bahwa yang membuat kekuasaan negara tidak berjalan sesuai tujuan dan fungsi adalah dominannya faktor "irrasional" dalam sistem otoritarianisme, seperti hubungan keluarga, pertemanan atau sentimen kedaerahan. "Nepotisme" dianggap sebagai akar terjadinya "kolusi" dan "korupsi" yang tumbuh subur di dalam sistem otoritarianisme. Begitu sistem itu digugurkan, diasumsikan faktor-faktor "irrasional" itu juga akan lenyap.

Artikel kecil ini mengambil posisi bahwa asumsi yang mengatakan negara beroperasi sepenuhnya rasional makin sulit dipertahankan. Berdasar pada sejumlah kajian antropologis, fenomena demokratisasi justru akan lebih baik didekati sebagai proses yang melibatkan keseluruhan unsur masyarakat (holistik) dan yang mewujud dalam berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya (komparatif) (Stoler 2004). Negara, dari sudut pandang ini, dilihat tidak sebagai satu entitas yang solid dan mandiri, yang lepas dari faktor kekerabatan, pola organisasi sosial, dan sejarah. Proses demokratisasi juga tidak berdampak sama pada satu negeri ke negeri lain, bahkan juga tidak merata pada wilayah yang berbeda pada satu negara sekali pun. Faktor-faktor lokal turut membentuk dan mengarahkan proses tersebut. Perspektif semacam ini memampukan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan secara nyata berjalan dalam relasi-relasi yang melibatkan unsur-unsur di dalam negara, pasar dan, bahkan, komunitas di tingkat paling bawah.

Lebih jauh, melihat dinamika relasi negara dan warga negara beberapa waktu terakhir ini, sejumlah studi mengusulkan relevansi konsep "precarious citizenship", kewarganegaraan yang rapuh (Bear and Mathur 2015). Konsep ini merujuk pada makin meluasnya fenomena ketidakpastian jaminan akses warga negara terhadap proteksi dan pelayanan negara--yang merupakan janji dasar dibentuknya negara modern. Ketidakpastian yang sebagian besar dipengaruhi mekanisme pasar global yang timpang tersebut tidak hanya melanda negara-negara bekas jajahan,

tetapi juga negara-negara pascaimperial yang, ironisnya, begitu gagah menawarnawarkan resep bentuk negara modern yang ideal ke negara-negara pascakolonial. Di negara-negara pascakolonial, potret precarious citizenship justru bukan merupakan tantangan baru. Tulisan ini akan memperlihatkan bagaimana warga prekariat (precarious citizen) bergerak di antara rasionalitas sekaligus irasionalitas, formalitas sekaligus informalitas, untuk mengakses ruang negara yang dianggap serba rasional itu.

Dalam hal ini, paradigma kekuasaan Weberian yang mengimplikasikan rasionalitas birokrasi sebagai mesin negara sudah tentu banyak mendapat gugatan. Seperti kita tahu, paradigma Weberian mengasumsikan birokrasi itu semacam "sangkar besi rasio" (Nugent 2004) yang bekerja mengatasi masyarakat, yang bersifat netral terhadap berbagai bentuk hubungan sosial, sentimen budaya, dan bersifat disinterested, lepas dari berbagai kepentingan. Meski tidak sepenuhnya menolak asumsi ini, saya memandang bahwa dalam negara pascakolonial, rasionalitas birokrasi justru hanya mungkin berjalan seiring dengan berbagai bentuk kekuasaan lainnya, baik berbasis tradisi maupun berbasis kharisma personal. Otoritas birokrasi berjalan secara interaksional dengan otoritas tradisional dan otoritas kharismatik. Dalam konteks negara pascakolonial di Asia, Afrika dan Amerika Latin, studi-studi lapangan, dengan basis argumen dan nada yang berbeda-beda tentu saja, melukiskan dengan baik bagaimana rasionalitas and irasionalitas, formalitas dan informalitas, itu bersama-sama membentuk dan menggerakkan entitas bernama negara (Berenschot 2019; Berenschot and Van Klinken 2018; Bernstein and Mertz 2011; Bierschenk and Olivier de Sardan 2014; Gupta 2012; Hetherington 2012; Millar 2014; Sharma 2018).

Pada tulisan ini, saya ingin memperlihatkan dinamika formalitas-informalitas itu melalui pegungkapan watak kekuasaan yang mendasari formasi negara dengan bersandar terutama pada pandangan-pandangan teoretik Eric Wolf (1966, 2001) dan saran-saran teoretis Thomas Gibson (2007) yang dihasilkan dari penelaahan etnografis-historis mengenai otoritas dan kekuasaan di Asia Tenggara. Secara lebih khusus, saya juga menyoroti satu aspek dari praktik kekuasaan negara, yakni pengaturan akses informasi. Aspek pengaturan akses informasi itu saya pandang penting, terutama karena praktik kekuasaan negara modern meletakkan informasi sebagai jantung pengaturannya. James Scott dalam Seeing Like a State memperlihatkan dengan baik bagaimana kekuasaan negara bekerja dengan cara "simplifikasi alam dan masyarakat" dalam bentuk "pengetahuan skematik" yang memudahkan kontrol dan manipulasi (1998:11). Tanah didata. Hutan didata. Penduduk didata. Seluruh wilayah dan isinya didata. Birokrasi bekerja bersandar pada dokumen, data, dan berbagai bentuk informasionalisasi "alam dan masyarakat" lainnya, dan kemudian meluncurkan kontrol dalam bentuk informasi pula (surat keputusan, petunjuk pelaksanaan/teknis, dll.). Wajar jika Ann Stoler (2004) menyebut teknik kekuasaan negara ini sebagai "mesin laparinformasi" (information-hungry machines).

Dalam konteks empiris di Indonesia, informasi menjadi perhatian penting khususnya sejak bergulirnya Reformasi pada 1998. Kekuasaan Orde Baru bertahan di antaranya lantaran kokohnya sistem kontrol terhadap berbagai jenis informasi terhadap apa yang menjadi objek kekuasaannya. Di era keterbukaan yang dipicu gerakan demokratisasi, yang di Indonesia kerap mengacu pada Reformasi 1998, kontrol negara terhadap informasi itu dipaksa untuk diperlonggar. Negara dituntut memberi ruang warga sipil untuk dapat mengakses berbagai jenis informasi yang dipegangnya itu. Regulasi demokratis ditancapkan demi menjamin akses warga, sehingga memungkinkan terwujudnya mekanisme "akuntabilitas" birokrasi modern. Akuntabilitas mengasumsikan dapat diceknya setiap keputusan organ negara melalui pemeriksaan berbagai informasi. Nah, pada tulisan ini, saya ingin menunjukkan bagaimana rasionalitas birokrasi yang memakai senjata baru bernama "akuntabilitas" itu tak pernah berjalan sesempurna dan semurni tujuannya. Apalagi, akuntabilitas itu sendiri bukan merupakan realitas natural melainkan juga merupakan konstruksi ideologis (Nuijten 2003:189). Karena itu, dalam konteks demikian, akses informasi warga hanya dapat terjadi dalam cara "rasional" sekaligus "irrasional". Saya akan menguatkan poin ini dengan merefleksikan data etnografis saya mengenai upaya akses informasi yang dipraktikkan sebuah komunitas warga di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur.

Kekuasaan dan Organisasi: Negara sebagai Proses

Memahami formasi negara dan dinamika birokrasi, di negara pascakolonial khususnya, membutuhkan pandangan yang non-esensialis tentang negara. Dalam hal ini, menurut saya, kita pertama-tama perlu meletakkan negara sebagai proses, bukan sebagai hasil final (Wolf 2001:393). Negara perlu dilihat sebagai praktik-praktik terkelola yang dibangun para aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Relasi antar aktor itu melibatkan berbagai sumberdaya, material maupun ideasional, yang tidak selalu merata terdistribusi antar aktor. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan yang bekerja dalam negara bersifat sangat dinamis. Pandangan Eric Wolf (2001) mengenai kekuasaan dan organisasi akan membantu memperjelas poin ini.

Menurut Wolf, untuk memahami kekuasaan, penting untuk mengidentifikasi empat "moda kekuasaan" (mode of power) (Wolf 2001:384–85). Pertama, kekuasaan yang mengacu pada atribut perseorangan: potensi atau kemampuan seseorang untuk bertindak. Menurut Wolf, konsep kekuasaan macam ini memberikan perhatian pada kekuatan seseorang dalam relasi kekuasaan, namun tak banyak memberikan pemahaman mengenai seperti apa bentuk dan ke mana arah tindakan itu berlangsung. Kedua, moda kekuasaan yang merujuk pada kemampuan diri (ego) untuk mendesakkan keinginannya pada orang lain. Melalui konsep ini, kita dapat melihat arah tindakan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Interaksi dan transaksi antar aktor juga dapat kita soroti. Moda kekuasaan ini bersifat interpersonal. Ketiga, moda kekuasaan yang mengacu pada cara-cara seseorang dalam mengarahkan atau menghambat kemampuan, potensialitas dan tindakan orang lain dalam satu setting atau lingkungan tertentu. Wolf menyebut moda kekuasaan ini sebagai "kekuasaan taktikal" (tactical power) atau "kekuasaan organisasional" (organizational power). Kekuasaan di sini tidak lagi

bersifat interpersonal, melainkan organisasional. Orang dapat menggunakan "unit operasional" dalam satu tata organisasi sehingga tindakan orang lain terhambat atau mengalir pada arah tertentu.

Pandangan kekuasaan yang terakhir ini, jika kita ulur lagi, akan membawa kita pada moda kekuasaan keempat. Wolf menyebut moda keempat ini dengan label "kekuasaan struktural" (structural power). Di sini yang menjadi sasaran bukan orang. Justru yang menjadi sasaran di sini adalah tata organisasi itu sendiri. Orang bertindak pada lingkungan tertentu, setting atau tata organisasi tertentu. Lingkungan menyediakan peluang dan kesempatan bagi tindakan-tindakan aktor. Lingkungan inilah yang di sini menjadi sasaran kekuasaan. Wolf mengakui bahwa "kekuasaan struktural" ini banyak mengacu pada konsep kekuasaan Foucauldian, yang memandang kekuasaan sebagai "kemampuan untuk menstrukturkan kemungkinan-kemungkinan medan tindakan orang lain" (Foucault 1984: 428 via Wolf 2001a). Kekuasaan struktural ini, menurut Wolf, membentuk medan sosial tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga tindakan tertentu mungkin berjalan tapi tindakan lainnya tidak atau kurang dimungkinkan (Wolf 2001:385).

Dalam melihat pola tindakan kolektif, dua moda kekuasaan terakhir dapat menjadi kerangka berpikir yang produktif dalam mencermati proses dan dinamika kekuasaan. Kita pun tak terjebak pada model organisasi tertentu, formal atau informal, negara modern atau masyarakat tanpa negara, masyarakat kapitalis atau nonkapitalis, dan sebagainya. Perspektif moda kekuasaan taktikal dan struktural tetap dapat diterapkan di sana. Cara pandang ini pun memungkinkan kita untuk melihat "wilayah kerja" kekuasaan di luar batas-batas lembaga formal negara. Proses operasi kekuasaan negara, secara internal pun, memperlihatkan saling menerobosnya kategori-kategori fungsi dan posisi yang ditetapkan secara formal. Sepakat dengan pandangan Fredrik Barth, organisasi formal bukannya tidak penting, melainkan bahwa organisasi formal bukanlah hal yang sebenarnya terjadi (Barth via Nuijten 2003:19).

Negara, sebagai salah satu bentuk organisasi dalam masyarakat kompleks (Wolf 1966), tidaklah terlepas dari hubungan kekuasaan yang terjalin sebelumnya, atau juga yang terbentuk di luar batas-batas formalnya. Bahkan, negara juga mengandung berbagai suborganisasi yang mengendalikan dan mendistribusikan kekuasaan demi saling bersaing antar sesamanya. Sekali lagi, negara bukan entitas monolitik, melainkan formasi yang terus membentuk diri melalui berbagai proses persaingan kekuasaan internal dan eksternal.

Negara Pascakolonial dan (Ir)rasionalitas Kekuasaan

Setelah memperlihatkan bagaimana negara perlu dilihat sebagai sebuah proses ketimbang sebagai produk atau hasil final, pada bagian ini saya ingin mendiskusikan bagaimana sejarah juga memainkan peran dalam pembentukan watak kekuasaan, lebih khususnya dalam negara-negara pascakolonial.

Kehadiran kolonialisme telah mengakibatkan transformasi sosial dan kultural yang sulit diabaikan. Kolonialisme memperkenalkan cara dan pengetahuan baru dalam mengatur dan mengendalikan alam dan masyarakat. Birokrasi dan rasionalitas modern dapat dikatakan hadir bersamaan dengan kehadiran kolonialisme ini. Begitu gelombang yang disebut 'dekolonisasi' melanda dunia pada 1940an hingga 1960an, dan wilayah-wilayah jajahan memproklamasikan kemerdekaannya, negara-negara baru ini menghadapi realitas yang berbeda. Di satu sisi, mereka mewarisi pola kekuasaan birokratis dari pemerintahan kolonial, sementara di sisi lain mereka berhadapan dengan berbagai bentuk kekuasaan lokal yang saling bersaing untuk turut menentukan arah dan bentuk negara.

Rezim-rezim negara baru itu dalam proses operasinya tidak dapat melepaskan dari berbagai ikatan 'tradisional', semisal ikatan darah, pertemanan atau sentimen 'identitas' lainnya (Wolf 1966). Saya ingin berargumen di sini bahwa asumsi rasionalitas birokratis dapat berjalan sendiri tanpa pelibatan berbagai bentuk otoritas lain dalam konteks ini sulit dipertahankan. Dengan melongok proses historis yang membentuk otoritas di negara-negara Asia Tenggara, kita dapat memahami bagaimana rasionalitas birokratis tidak pernah benar-benar menggantikan operasi kekuasaan tradisional. Penelitian yang dilakukan Gibson (2007) menunjukkan dengan sangat baik bagaimana proses itu dapat berlangsung.

Gibson menggunakan rumusan Weber mengenai tiga tipe ideal otoritas politik sebagai titik tolak, namun kemudian mendialogkannya dengan sejumlah pemikir ilmu sosial lain, termasik Levi-Strauss, Durkheim dan Foucault (Gibson 2007:4). Secara umum, Weber melihat bahwa meskipun sebagian besar perilaku manusia dipandu oleh tradisi dan kebiasaan, ada hal-hal penting tertentu yang dipandu oleh pilihan sadar. Pilihan-pilihan sadar itu muncul untuk mencapai berbagai tujuan yang saling bersaing. Ada dua tujuan besar yang diidentifikasi Weber. Tujuan pertama mengacu pada keselamatan akhir, yang biasa diformulasikan dalam kepercayaan agama-agama Semitik sebagai Hari Akhir, Surga, Hari Penyelamatan, dan seterusnya. Tujuan kedua mengacu pada hasil nyata di sini, yang biasanya berbentuk keuntungan ekonomis atau posisi politis. Dari sini, Weber merumuskan tiga tipe otoritas itu. Pertama, otoritas yang berbasis pada tradisi dan kebiasaan – Weber sebut sebagai otoritas tradisional. Kedua, otoritas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan keselamatan akhir – Weber sebut sebagai otoritas kharismatis. Ketiga, otoritas yang dibangun berdasar rasionalitas ekonomis-Weber sebut sebagai otoritas legal-rasional.

Ketiga bentuk otoritas ini, Gibson meyakini, berjalinan erat dengan bentuk-bentuk pengetahuan tertentu (Gibson 2007:12). Otoritas tradisional bekerja, diproduksi dan direpoduksi melalui pengetahuan implisit yang terdapat dalam ritual, totemisme dan mitologi, misalnya. Otoritas kharismatis melestarikan dirinya lewat pengetahuan profetik yang terpatri dalam teks-teks suci. Terakhir, otoritas legal-rasional mendasarkan operasinya pada apa yang disebut Gibson sebagai "pengetahuan dokumenter". Dibanding dengan dua bentuk pengetahuan lainnya, pengetahuan dokumenter ini bersifat paling eksplisit. Pengetahuan tradisional, sekalipun tak jarang dituangkan dalam bentuk tulisan (sebagaimana banyak ditemukan sejarawan dalam teks-teks kuno), secara dominan tetap bersifat implisit, sehingga distribusi dan sirkulasinya pun dilangsungkan melalui bentuk-bentuk simbolik semacam ritual dan laku tubuh tertentu. Pengetahuan profetik

sudah banyak mengadopsi bentuk tulisan. Kendati bentuk-bentuk eksplisitnya berlimpah, berbagai gambaran metaforis-simbolik tetap menjadi jantung muatanmuatan pengetahuan profetik ini.

Pengetahuan dokumenter, Gibson mengklaim, memiliki ciri dan cara kerja yang sangat berbeda. Pengetahuan model ini diperoleh melalui pendokumentasian tertulis yang objektif dan impersonal terhadap wilayah, orang dan alam (Gibson 2007:19). Sifat impersonal dan objektif, yang disebut Scott (1998) dengan istilah "skematik" itu, memungkinkan dokumen itu didistribusikan dari satu tangan ke tangan lain secara lepas. Proses informasionalisasi itu sesungguhnya merupakan proses dicopotnya pengetahuan dari partikularitas lokasi, waktu maupun orang. Dengan begitu, sirkulasi dan distribusi informasi itu dapat dilakukan tanpa mempedulikan hubungan darah produsen-konsumennya (seperti pada pengetahuan tradisional) maupun kualitas kharismatis seseorang (seperti pada pengetahuan profetik). Sirkulasi pengetahuan dokumenter bekerja berdasar pada mekanisme impersonal.

Ketiga bentuk otoritas itu bukanlah deskripsi evolusionistik, yang menganggap satu bentuk otoritas mencerminkan fase perkembangan tertentu yang kemudian digantikan bentuk otoritas lainnya. Terutama di negara-negara pascakolonial, ketiga bentuk otoritas dan pengetahuan itu berkaitan dengan rangkaian proses-proses kognisi dan sosial yang berjalan secara bersama, berinteraksi satu sama lain. Bagi yang percaya bahwa pengetahuan dokumenter dan otoritas birokratik merupakan bentuk kekuasaan paling sah, murni, bekerja berdasarkan "kepentingan umum" yang tidak dicampuri sentimen-sentimen kelompok yang "irrasional", asumsi ini mungkin sulit diterima. Secara historis, Gibson menunjukkan bagaimana interaksi tiga bentuk otoritas dan pengetahuan itu mewarnai negara-negara pascakolonial di Asia Tenggara sejak abad ke-16 hingga abad ke-21 sekarang ini. Hasil interaksinya macam-macam. Otoritas tradisional semula dominan (sistem kepemimpinan klan), namun ketika otoritas kharismatis (kepemimpinan agama) mulai mendapatkan penerimaan, terjadi gejolak politik yang berujung pada dilibatkannya otoritas birokratik (kekuatan kolonial). Terkadang otoritas birokratik dominan, sedangkan otoritas kharismatik dan tradisional menjadi oposan bahkan menggerakkan perlawanan bersenjata. Pada kesempatan lain, ketika otoritas kharismatis ingin mendominasi dan melenyapkan bentuk otoritas lainnya, kedua otoritas lain melawan. Otoritas birokratik akan menentang dengan logika "clean governance", "akuntabilitas", "transparansi", dan seterusnya. Sementara itu, otoritas tradisional akan memberontak atas nama "budaya lokal", "tradisi", "warisan leluhur", dan seterusnya.

Pandangan Gibson yang didukung dengan telaah historis itu memperkuat apa yang dipertahankan Wolf bahwa hubungan kekuasaan senantiasa melibatkan the dialectical interplay between formal structures and the different kinds of informal: associations among persons operating within those structures" (dialektika saling memengaruhi antara struktur formal dan berbagai jenis asosiasi informal antar orang yang beroperasi di dalam struktur tersebut) (Wolf 1966). Operasi kekuasaan dalam struktur negara, dengan demikian, berlangsung secara "rasional" sekaligus "irrasional". Ini dapat terjadi, menurut Wolf, lantaran yang menjadi sentral dalam persaingan dan pengendalian kekuasaan adalah sumberdaya (resources). Dalam masyarakat kompleks sekalipun, kita dapat menemukan bagaimana letak sumberdaya strategis senantiasa beriringan dengan pola organisasi tertentu yang mempertahankannya. Struktur politik formal (legal-rasional) tidak dapat berjalan sendiri. Menurut Wolf, ia berjalan bergandengan dengan setidaknya tiga rangkaian struktur informal dalam masyarakat kompleks, yakni kekerabatan (kinship), pertemanan (friendship) dan hubungan patronase (patron-client relations). Kita dapat mengadopsi pandangan Wolf ini untuk melihat negara-negara pascakolonial. Sangat jelas di sana bahwa negara bukan satu-satunya organisasi yang ada untuk mengontrol berbagai sumberdaya tersebut. Sebelumnya sudah ada berbagai jenis organisasi berbasis kekerabatan tradisional atau pun kharisma spiritual. Jika mau tetap bertahan, struktur kekuasaan formal harus mampu berjalinan dengan berbagai organisasi yang ada itu untuk menyerap berbagai sumberdaya.

Sumberdaya menjadi alat sekaligus tujuan sistem kekuasaan formal di sini. Tanpa sumberdaya, sistem kekuasaan akan rontok. Dan untuk dapat terus lestari, sistem itu harus terus mengamankan sumberdaya-sumberdaya strategis. Birokrasi menjadi instrumen negara untuk mengelola sumberdaya. Ia hanya mungkin berjalan, dengan demikian, jika "rasionalitas" dan "irrasionalitas" itu sama-sama bergerak ibarat sepasang kaki yang melangkah.

Mengatur Informasi, "Memurnikan" Rasionalitas Negara

Gelombang demokratisasi di Indonesia yang kerap diasosiasikan dengan gerakan Reformasi 1998 memicu naik daunnya apa yang diistilahkan Gibson sebagai pengetahuan dokumenter dan otoritas birokratik. Penghapusan "KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme) menjadi tuntutan dominan. Secara implisit, tuntutan ini mengandaikan dimungkinkannya "kemurnian" kekuasaan legalrasional dari "pencemaran" hubungan kekerabatan, pertemanan dan patron-klien. Berbagai instrumen regulasi pun dibuat guna merealisasikan tuntutan tersebut. Mulai dari UU Anti Korupsi, UU Hak Asasi Manusia (HAM), UU Telekomunikasi, UU Penyiaran hingga UU Pers. Keseluruhan regulasi itu mengasumsikan kekuasaan yang akuntabel, transparan, bersih dari korupsi, dan selalu dapat dicek oleh masyarakat melalui media dan berbagai saluran komunikasi dan informasi. Ada satu undang-undang yang memiliki semangat serupa, tapi baru disahkan sembilan tahun kemudian, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP ini merupakan aturan yang mewajibkan dibukanya informasi lembagalembaga pemerintah dan dijaminnya akses warga terhadap berbagai informasi itu. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik menjadi kata-kata kunci yang melandasi filosofi UU KIP tersebut.

Di sini saya menyoroti UU KIP secara khusus sebagai ilustrasi mengenai berkelindannya berbagai struktur formal dan informal dalam arena kekuasaan (Wolf 1966) atau saling interaksinya tiga bentuk pengetahuan dan otoritas (Gibson 2007). UU KIP ini juga mencerminkan bagaimana "pengetahuan skematik" (Scott 1998) atau "pengetahuan dokumenter" (Gibson 2007) menjadi sentral dalam

operasi kerja negara modern. Selain itu, mengikuti alur pemikiran Wolf (Wolf 1966), pengaturan terhadap akses informasi ini mencerminkan bekerjanya "kekuasaan struktural" yang menyasar struktur penataan atau organisasi, bukan orang secara langsung. Di sisi lain, UU KIP juga menjadi arena di mana proses marketisasi, yang menembus formasi negara dan menciptakan apa yang disebut "precarious citizenship" (Bear and Mathur 2015), pada akhirnya juga turut mengubah bentuk respon warga negara yang bergerak di antara rasionalitas dan irasionalitas, antara formalitas dan informalitas.

UU KIP ini membawa asumsi-asumsi yang khas "pengetahuan dokumenter", salah satunya adalah apa yang disebut "tertib dokumentasi". "Tertib dokumentasi adalah salah satu kunci penting dalam menjalankan keterbukaan informasi" (Subagiyo dkk 2009: 123). Logikanya, tanpa ada dokumentasi yang teratur, kompleksitas alam dan masyarakat tidak dapat dirumuskan, dan akibatnya tidak dapat dikelola dan dikendalikan. Keterbukaan informasi mencegah dirahasiakannya informasi-informasi tersebut yang jika dibiarkan tertutup dapat menjadi sumber penyelewengan otoritas yang sudah dberi cap sah secara legalrasional. Nah, keterbukaan itu menjadi tidak ada artinya jika informasionalisasi tidak berjalan dengan baik. Dapat dipahami di sini mengapa kearsipan dipandang memiliki "niat mulia" untuk "menjamin keselamatan bahan pertanggungan jawab nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah" (UU Kearsipan, Pasal 3).

Dilihat dari proses pengundangannya yang alot (memakan waktu hingga delapan tahun, dari 2000-2008), UU KIP ini melibatkan tiga kekuatan berbeda: masyarakat sipil, negara dan korporasi. Negara terdiri dari elemen eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (Parlemen). Kekuatan-kekuatan ini saling berinteraksi secara dinamis dalam mengarahkan proses "kekuasaan struktural" tersebut. Sebagai contoh, masyarakat sipil mengajukan label "kebebasan" untuk menamai UU KIP ini. Draft yang diajukan oleh masyarakat sipil diberi nama "Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik" (UU KMIP) (Sastro dkk 2010: 2-3). Namun, karena elemen lain, terutama elemen negara, tidak menyetujui, akhirnya nama diubah menjadi UU KIP.

Contoh lain mengenai kategori "badan publik". Kategori ini menjadi penting sebab akan berimplikasi pada lembaga mana yang berkewajiban membuka informasi dan memberi akses warga terhadap informasi-informasi itu. Semula, elemen negara menolak jika Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), dengan argumen bahwa itu masuk katerori perusahaan (privat) yang harus menjaga rahasia dagang. Ketika masyarakat sipil mendesak bahwa dana yang dipakai sebagai saham dalam BUMN/BUMD itu adalah dana publik, sehingga terkena kewajiban untuk terbuka kepada publik, BUMN/BUMD pun ditetapkan sebagai badan publik. Sebagai imbalannya, seluruh organisasi masyarakat sipil (Ornop, nongovernmental organization – NGO) juga masuk kategori badan publik apabila menerima dana dari anggaran pemerintah, masyarakat atau dana publik luar negeri (Subagiyo dkk 2009: 31-34). Menariknya, perusahaan swasta, meskipun berpeluang untuk mengelola urusan publik (seperti air, listrik, energi, obat-obatan), tetap dikategori bukan badan publik. Artinya, korporasi internasional mana pun yang masuk Indonesia tidak dikenai kewajiban memberi akses informasi kepada warga negara Indonesia.

Berjalannya proses "kekuasaan struktural" juga tampak pada penetapan apa yang disebut "pengecualian informasi". Meskipun gelombang "rasionalisasi" otoritas birokratis begitu kencang, negara tetap menyediakan bayangan-bayangan kekuasaaan "irrasional" yang paradoksnya justru terwujud melalui argumenargumen "legal-rasional". Pada 17 UU KIP memuat berbagai bentuk "informasi dikecualikan", yang tidak boleh diakses warga, mulai dari informasi intelijen hingga informasi yang jika dibuka akan "membahayakan pertahanan dan kemanan negara". Di luar regulasi ini, berbagai regulasi lain dan regulasi turunan juga turut membentuk kategori "informasi dikecualikan" yang tertutup dari akses warga. Ini artinya berbagai peluang untuk menjalankan kekuasaan di luar tatapan mata "keterbukaan" tetap terus berlangsung.

Kekuasaan Taktikal dan Siasat Warga Prekariat

Jika "kekuasaan struktural" membentuk dinamika proses regulasi di level nasional, "kekuasaan taktikal" tampak turut mewarnai praktik-praktik akses di level komunitas paling bawah. Suatu komunitas di kawasan terdampak lumpur Lapindo, Sidoarjo, memahami bagaimana struktur formal dibuat sedemikian rupa agar ruang kuasa warga makin terbatas, di satu sisi, dan kepatuhan mereka terhadap kekuasaan negara makin mantap, di sisi lain.

Pertama kali menyembur pada 29 Mei 2006, lumpur panas yang diakibatkan kesalahan pengeboran PT Lapindo Brantas telah menggenangi lahan-lahan dan pemukiman-pemukiman di kawasan Porong, Sidoarjo. Kerugian yang dialami warga bersifat multidimensi, mulai yang bersifat material (kehilangan rumah, sawah, ternak, tambak, ladang), psikologis, kultural hingga spiritual--kehilangan tempat-tempat khusus yang bernilai spiritual. Secara kasar saja, pada tahun pertama semburan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kerugian mencapai Rp 11 miliar. Semburan lumpur panas itu telah menenggelamkan belasan desa dan telah memaksa lebih dari 70.000 penduduk mengungsi. Dalam situasi seperti ini, warga dipaksa berhadapan dengan korporasi swasta untuk memperoleh ganti rugi yang berubah menjadi skema transaksi jualbeli. Warga juga dipaksa bergulat dengan birokrasi negara demi memperoleh hakhaknya (Hamdi 2015; Novenanto 2019).

Situasi yang dialami warga korban lumpur Lapindo tersebut memperlihatkan secara gamblang bagaimana "precarious citizenship" (Bear and Mathur 2015) dibentuk oleh dominasi penetrasi pasar yang bekerja melalui legalitas negara. Kewarganegaraan prekariat semacam ini dicirikan oleh ketidakstabilan atau tidak terjaminnya inklusi dalam skema negara pascakolonial atau bahkan negaranegara kesejahteraan. Di negara kesejahteraan sekali pun, pemberian layanan, akses informasi, akses terhadap keadilan, telah mengalami perubahan ke arah relasi kontraktual serupa arena pasar akibat masifnya proses marketisasi. Pada

kesempatan lain, saya mengurai cukup panjang bagaimana marketisasi dan moneterisasi telah mengubah secara signifikan berbagai dimensi kehidupan korban lumpur Lapindo (Hamdi 2015). Di sini cukup dikatakan bahwa, dalam situasi semacam itu, akses warga terhadap barang publik (public goods) yang ditangani negara telah berubah menjadi seperti akses seorang konsumen terhadap produsen dalam sistem transaksi jual-beli.

Warga korban lumpur Lapindo berhadapan dengan wujud paling nyata dari marketisasi relasi negara-warga negara tersebut. Sebagai cara untuk bertahan hidup dan mengklaim haknya, orang-orang korban Lapindo itu tidak mengubah struktur formal, melainkan memainkan "kekuasaan taktikal" untuk merebut informasi. PT Lapindo Brantas sebagai entitas korporasi privat, jika dikategorikan sesuai UU KIP, bukan merupakan badan publik, sehingga ketertutupan akses informasi pun bukan merupakan pelanggaran "legal". Karena itu, warga korban Lapindo harus menggunakan siasat cerdas. Di lapangan, sepanjang 2008-2012, saya mendengar berbagai cerita mengenai bagaimana warga mengakses informasi di dalam korporasi "privat" tersebut. Sebagian menggunakan ikatan pertemanan dan persaudaraan untuk memperoleh akses. Sebagian memanfaatkan tekanan kolektif warga (nggeruduk). Sebagian lain secara diam-diam "mencuri". Informasi bagi mereka penting untuk mengetahui kapan ganti rugi diberikan, misalnya, atau mengapa terlambat atau tidak diberikan.

Komunitas korban Lapindo lainnya mengarahkan sasaran akses informasi ke badan pemerintahan, yang sudah tentu masuk kategori badan publik. Permasalahannya, UU KIP mensyaratkan berbagai prosedur yang memakan waktu belasan hari untuk dapat mengakses satu jenis informasi. Jika informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan dalam surat yang dibuat warga, warga dapat mengajukan "sengketa informasi" yang dapat memakan waktu hingga seratus hari. Warga membutuhkan informasi cepat. "Kekuasaan taktikal" berjalan di sini. Warga mengajukan surat permintaan akses informasi sesuai dengan UU KIP, namun menyertainya dengan tekanan kolektif agar informasi segera diberikan. Di samping itu, ketika menemui pejabat badan publik dengan datang bersama-sama, sosok tokoh warga yang dihormati diajukan sebagai juru bicara. Mereka mendesak pejabat publik datang langsung menemui warga di kampung untuk menyampaikan informasi yang mereka minta, yaitu informasi tentang jaminan kesehatan. Dengan desakan itu, pejabat publik terpaksa harus turun kampung. Informasi tentang pendataan penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diberikan. Melihat sedikitnya warga yang secara formal menjadi penerima Jamkesmas, warga protes. Mereka mengajukan data bandingan bahwa seribu lebih warga desa kian termiskinkan dan berhak memperoleh Jamkesmas. Dengan berbagai proses lanjutan, akhirnya seribu lebih warga tersebut dicatat sebagai penerima Jamkesmas.

Regulasi dan praktik akses informasi yang dilakukan warga ini menguatkan pandangan Wolf bahwa dalam masyarakat kompleks, struktur formal bekerja saling memengaruhi dengan struktur informal. Hal itu terjadi pada berbagai level. Di level regulasi, aktor-aktor saling bersaing untuk menetapkan aturan dan kategori-kategori demi mempertahankan dan mengubah kendali dan distribusi sumberdaya. Kekuataan korporat mampu mempertahankan kekebalannya terhadap akses informasi dengan meletakkan diri sebagai "badan usaha privat". Badan-badan pemerintahan pun meneguhkan kategori "informasi dikecualikan" demi agar upayanya mengontrol dan mengatur aliran sumberdaya tidak mudah dipatahkan. Di level komunitas bawah, berbagai interaksi antara struktur formal dan informal memungkinkan warga mendapat akses informasi yang dibutuhkan. Bentuk-bentuk "kekuasaan taktikal" juga diluncurkan demi mampu bergerak meraih akses di tengah sempitnya ruang struktur formal yang ditetapkan kekuasaan dominan. Pelajaran-pelajaran ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sejauh kekuasaan adalah mengenai penguasaan dan pengendalian sumberdaya, maka "rasionalitas" sangat sulit, untuk tidak mengatakan mustahil, diceraikan dari "irrasionalitas".

Penutup

Tulisan ini memperlihatkan bagaimana negara modern sebagai proses pengelolaan persaingan kekuasaan sesungguhnya tidak pernah beroperasi secara sepenuhnya rasional. Birokrasi, sebagai wujud paling rasional dari negara sekali pun, dibentuk melalui dinamika kekuasaan yang berlangsung sepanjang perjalanan sosio-historis, termasuk pengalaman menjadi wilayah jajahan. Pada situasi kontemporer, ambiguitas birokrasi negara modern itu makin kompleks dengan dominannya penetrasi pasar dalam relasi negara-warga. Efeknya, posisi warga dalam mengakses haknya kepada negara makin tidak pasti karena dimediasi mekanisme transaksi mirip pasar yang pada akhirnya menimbulkan bentuk kewargaan yang belakangan disebut sebagai *precarious citizenship*. Dalam menghadapi situasi yang makin rentan itu, praktik sehari-hari warga untuk bertahan dalam berelasi dengan negara dan korporasi/pasar adalah dengan memainkan apa yang disebut Wolf sebagai kekuasaan taktikal. Di sini, lagi-lagi, formalitas dan rasionalitas hanya memainkan peran pinggiran bagi warga prekariat, baik untuk sekadar bertahan hidup maupun untuk terlibat dalam kehidupan sosial lebih luas.

Daftar Pustaka

- Bear, Laura, and Nayanika Mathur. 2015. "Remaking the Public Good: A New Anthropology of Bureaucracy." *The Cambridge Journal of Anthropology* 33(1):18–34.
- Berenschot, Ward. 2019. "Informal Democratization: Brokers, Access to Public Services and Democratic Accountability in Indonesia and India." *Democratization* 26(2):208–24.
- Berenschot, Ward, and Gerry Van Klinken. 2018. "Informality and Citizenship:

- The Everyday State in Indonesia." *Citizenship Studies* 22(2):95–111.
- Bernstein, Anya, and Elizabeth Mertz. 2011. "Bureaucracy: Ethnography of the State in Everyday Life." *PoLAR* 34:6.
- Bierschenk, Thomas, and Jean-Pierre Olivier de Sardan. 2014. States at Work: Dynamics of African Bureaucracies. Brill.
- Gibson, Thomas. 2007. Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia: From the 16th to the 21st Century. Springer.
- Gupta, Akhil. 2012. Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India. Duke University Press.
- Hamdi, Mujtaba. 2015. "Efek Lapindo: Transformasi Lanskap, Relasi Sosio-Spasial Dan Komensurasi NIlai Di Era Pasar." Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
- Hetherington, Kregg. 2012. "Promising Information: Democracy, Development, and the Remapping of Latin America." Economy and Society 41(2):127–50.
- Millar, Kathleen M. 2014. "The Precarious Present: Wageless Labor and Disrupted Life in Rio de Janeiro, Brazil." *Cultural Anthropology* 29(1):32–53.
- Novenanto, Anton. 2019. "Dampak Sosial-Ekonomi Pemindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo, Jawa Timur." Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 21 No. 3.
- Nugent, David. 2004. "Governing States." A Companion to the Anthropology of Politics
- Nuijten, Monique. 2003. Power, Community and the State. The Anthropology of Political Organization. London, Pluto Press.
- Sastro, Dhoho A. dkk. 2010. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: LBH Masyarakat dan Yayasan Tifa.
- Scott, James C. 1998. Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press.
- Sharma, Aradhana. 2018. "New Brooms and Old: Sweeping up Corruption in India, One Law at a Time." Current Anthropology 59(S18):S72–S82.
- Stoler, Ann Laura. 2004. "Affective States." A Companion to the Anthropology of Politics 4–20.
- Subagiyo, Henri, dkk. 2009. Anotasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Komisi Informasi Pusat, ICEL dan Yayasan Tifa.
- Wolf, Eric R. 1966. "Kinship, Friendship, and Patron-Client Relations in Complex Societies." The Social Anthropology of Complex Societies 1–22.
- Wolf, Eric R. 2001. "Facing Power: Old Insights, New Questions." Pathways of Power: Building an Anthropology Ofthe Modem World. Berkeley; Los Angeles.



Pedoman Penulisan

Naskah artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan panjang 5000-8000 kata. Lebih dari 8000 kata ditoleransi dengan catatan bahwa kelebihan tersebut sepadan dengan data, informasi, serta analisis dan diskusi yang dikerjakan. Naskah merupakan hasil penelitian maupun refleksi kritis atas sebuah pemikiran, teori, atau metodologi dalam sosiologi atau ilmu sosial secara umum. Penting diingat bahwa naskah yang diajukan tidak tengah dalam proses pengajuan atau dalam proses telaah (*review*) di jurnal lain. Pengajuan naskah artikel dilakukan melalui menu *submission* (pengajuan) di website http://journal.unusia.ac.id/index.php/Muqoddima.

Naskah ditulis dengan menggunakan font Book Antiqua pada program Microsoft Word, dengan ekstensi .doc, .docx, atau .rtf. Sistem penulisan secara umum adalah sebagai berikut:

Judul

Judul merefleksikan isi tulisan, singat, padaat dan diupayakan menarik minat pembaca. Font sebesar 20 poin, dengan huruf kapital di depan setiap kata (*Capitalized Each Word*) kecuali kata sambung. Panjang judul tidak lebih dari 10 kata. Hindari menggunakan tanda kurung (...) dalam judul.

Nama dan identitas penulis

Nama lengkap penulis dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai keterangan institusi dan alamat email.

Abstrak dan kata kunci

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan panjang antara 150-250 kata. Abstrak seutuhnya ditulis dalam bentuk naratif memuat kajian, tujuan penelitian, metodologi, temuan, dan argumentasi. Kata kunci maksimal terdiri atas 6 (enam) kata/frasa.

Tubuh artikel

Tubuh artikel ditulis dengan ukuran huruf 11 poin, kecuali untuk sub judul (13 poin) dan catatan kaki (10 poin). Setiap awal paragraf ditulis menjorok ke dalam sepanjang 1 cm. Penggunaan kata-kata asing dituliskan secara miring (*italic*). Tubuh artikel memuat empat komponen pokok meliputi (1) pendahuluan, (2) metode/cara kerja, (3) analisis dan diskusi, dan (4) kesimpulan.

Catatan kaki

Catatan kaki dituliskan hanya jika diperlukan, yakni untuk memberikan keterangan tambahan atasu suatu hal spesifik yang tidak sinambung secara langsung bila diletakkan sebagai bagian tubuh artikel. Hindari menggunakan catatan kaki jika berkenaan dengan sumber rujukan teoritis atau sumber data primer.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka ditulis dengan mengikuti standar format <u>ASA (American Sociological Association)</u>. Format ASA juga berlaku dalam penulisan kutipan di tubuh artikel, termasuk

- catatan perut dan catatan kaki (*note, footnote*). Berikut ini adalah berapa contoh penulisan isi Daftar Pustaka:
- Andreassen A., Bard. 2007. "Human Rights and Legal Empowerment of the Poor", Extreme Poverty and Human Rights Expert Seminar, Geneva 23-24 February 2007, Norwegian Centre for Human rights, University of Oslo.
- Fatoni, Muhammad Sulton. 2015. *Kapital Sosial Pesantren (Studi Tentang Komunitas Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Geertz, Clifford. 1965. "Religion: Anthropological Study", dalam David L. Sills (ed.) *International Encyclopedia of the Social Sciences*. London: Collier-Macmillan Publishers.
- Jones, Bobby L., Daniel S. Nagin, dan Kathryn Roeder. 2001. "A SAS Procedure Based on Mixture Models for Estimating Developmental Trajectories." *Sociological Methods and Research* 29 (3):374-93. Diakses pada 26 April 2005 (https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124101029003005).
- Kukathas, Chandran. 2002. "Multiculturalism as Fairness: Will Kymlicka's Multicultural Citizenship." *Journal of Political Philosophy* 5(4):406-427. Diakses pada 27 Mei 2019. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9760.00041)
- Keterangan lebih rinci terkait ketentuan penulisan dapat diperiksa dalam <u>Template</u> <u>Artikel MJPRS</u>.





